

ANALISIS POTENSI PERAN KEIMIGRASIAN DALAM PENGAMANAN PEMILU MELALUI OPERASI PENGAWASAN ORANG ASING “JAGRATARA”

(ANALYSIS OF THE POTENTIAL ROLE OF IMMIGRATION IN ELECTION
OBSERVATION THROUGH THE "JAGRATARA" FOREIGN SURVEILLANCE
OPERATION)

<https://10.0.205.137/tematics.v6i1.589>

Submitted: 14-04-2024 Reviewed: 11-05-2024 Published: 13-06-2024

Atsil Syah Gibran
teukuatsil@gmail.com
Politeknik Imigrasi

Andika Ardiansyah
andika.23ardiansyah@gmail.com
Politeknik Imigrasi

Besse Hartati
hartatimassale@yahoo.com
Politeknik Imigrasi

Abstrak

Pemilu Indonesia tahun 2024, yang melibatkan pemilihan Presiden, Wakil Presiden, anggota legislatif, dan perwakilan daerah, memunculkan kekhawatiran akan potensi ancaman, seperti manipulasi suara, penyebaran informasi palsu, dan campur tangan pihak eksternal. Untuk mengatasi hal ini, pentingnya pengawasan yang ketat dalam mencegah potensi pelanggaran menjadi fokus, termasuk dalam memahami peran keimigrasian dalam pengamanan pemilu melalui operasi pengawasan orang asing "Jagratara." Kehadiran orang asing di wilayah suatu negara menjadi hal yang umum, namun juga menimbulkan kekhawatiran terkait potensi campur tangan dalam proses demokratisasi, terutama dalam pemilihan umum. Oleh karena itu, analisis komprehensif terhadap konsep, dampak, dan strategi yang terlibat dalam operasi "Jagratara" diharapkan dapat memberikan solusi dan rekomendasi efektif untuk mengoptimalkan peran keimigrasian dalam menjaga kelancaran dan keabsahan setiap tahapan pemilihan umum. Diharapkan pula bahwa jurnal ini dapat memberikan kontribusi positif terhadap pengembangan



kebijakan dan langkah-langkah strategis dalam memastikan pemilu yang bersih, bebas, dan adil.

Kata Kunci: Peran Keimigrasian, Pengaman Pemilu, Pengawasan Orang Asing

Abstract

The 2024 Indonesian elections, which involve the election of the President, Vice President, legislative members and regional representatives, raise concerns about potential threats, such as vote manipulation, the spread of false information and interference from external parties. To overcome this, the importance of strict supervision in preventing potential violations is brought into focus, including in understanding the role of immigration in election security through the foreigner surveillance operation "Jagratarata." The presence of foreigners in a country is common, but also raises concerns regarding potential interference in the democratization process, especially in general elections. Therefore, a comprehensive analysis of the concepts, impacts and strategies involved in the "Jagratarata" operation is expected to provide effective solutions and recommendations to optimize the role of immigration in maintaining the smoothness and validity of each stage of the general election. It is also hoped that this journal can make a positive contribution to the development of policies and strategic steps in ensuring clean, free and fair elections.

Keywords: Role of Immigration, Election Security, Supervision of Foreigners

1. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pemilihan Umum (Pemilu) merupakan salah satu fondasi utama dalam sistem demokrasi, di mana warga negara berhak untuk memilih wakilnya dalam proses pengambilan keputusan. Proses pemilu memainkan peran sentral yang akan mewakili kepentingan masyarakat di lembaga legislatif dan eksekutif, Pelaksanaan pemilu yang adil, transparan, dan bebas dari intervensi eksternal menjadi aspek utama dalam menjaga integritas demokrasi suatu negara

Di tahun 2024, Indonesia melaksanakan Pemilu yang terdiri dari pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota.¹ Pelaksanaan Pemilu melibatkan berbagai elemen, termasuk lembaga penyelenggara pemilu, partai politik, pemilih, dan lembaga-lembaga lain yang secara bersama-sama mewujudkan proses demokrasi ini.

Di tengah euforia demokrasi ini, potensi ancaman terhadap pemilu juga

¹ Sumber Komisi Pemilihan Umum

muncul sebagai tantangan yang tidak dapat diabaikan. Ancaman ini mencakup berbagai aspek, mulai dari potensi manipulasi suara, penyebaran informasi palsu, hingga campur tangan pihak eksternal yang mungkin berupaya mempengaruhi hasil pemilu.² Oleh karena itu, perlunya upaya bersama untuk menjaga keberlangsungan proses demokrasi menjadi semakin mendesak, termasuk dalam memahami dan mengatasi potensi ancaman tersebut.

Keberhasilan pemilu tidak hanya bergantung pada partisipasi aktif warga negara, tetapi juga pada pengawasan yang ketat terhadap segala potensi pelanggaran. Salah satu aspek yang muncul sebagai perhatian serius adalah potensi peran keimigrasian dalam pengamanan pemilu, sebagai upaya preventif dari ancaman eksternal melalui operasi pengawasan yang melibatkan orang asing, yang dikenal dengan sebutan "Jagratarata."

Pergerakan lintas batas semakin intens, sehingga kehadiran orang asing di wilayah suatu negara menjadi hal yang umum. Namun, sejalan dengan kehadiran mereka, timbul pula kekhawatiran terkait potensi campur tangan dalam proses demokratisasi, khususnya dalam pemilihan umum. Oleh karena itu, analisis mendalam terhadap potensi peran keimigrasian dalam pengamanan pemilu melalui operasi "Jagratarata" menjadi penting untuk menjaga integritas dan legitimasi hasil pemilu.

Jurnal ini bertujuan untuk menganalisis secara komprehensif potensi peran keimigrasian dalam pengamanan pemilu, dengan fokus pada operasi pengawasan orang asing "Jagratarata." Melalui tinjauan yang mendalam terhadap konsep, dampak, dan strategi yang terlibat, diharapkan dapat ditemukan solusi dan rekomendasi yang efektif untuk mengoptimalkan peran keimigrasian dalam menjaga kelancaran dan keabsahan setiap tahapan pemilihan umum. Selain itu, jurnal ini diharapkan dapat memberikan kontribusi positif terhadap pengembangan kebijakan dan langkah-langkah strategis dalam memastikan pemilu yang bersih, bebas, dan adil.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas, maka rumusan masalah yang dibahas dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Bagaimana hubungan imigrasi dengan pelaksanaan pemilihan umum di Indonesia?
- b. Bagaimana peran imigrasi dalam upaya mengentaskan ancaman pada pemilihan umum

2. METODE

2.1. Pendekatan

Metodologi yang ditempuh oleh penulis dalam penelitian ini adalah

² Daniah Kholda and Putu Jodhita Putri, "DEMOKRASI DAN PERKEMBANGANNYA DENGAN TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI (TIK): WACANA DIGITALISASI DALAM PEMILIHAN UMUM DI INDONESIA TAHUN 2024 Daniah Kholda , Putu Jodhita Putri Jurnal Ilmu Hukum , Sosial , Dan Humaniora Pendahuluan Topik Pembahasan Da" 1, no. 2023 (2024): 37–45.

metode socio-legal dan metode hukum normatif dengan pendekatan kualitatif dari sumber primer hingga sekunder. Dalam metode hukum normatif, dasar yuridis seperti peraturan perundang-undangan, hukum internasional, dan aturan hukum turunan lainnya digunakan sebagai rujukan utama, sedangkan objek kepustakaan lainnya seperti jurnal ilmiah dan sumber kredibel dari internet digunakan sebagai rujukan sekunder yang turut menunjang keabsahan hasil penelitian. Penulis juga mengombinasikan metode socio-legal dengan mengaplikasikan analisis dari disiplin ilmu sosial sebagai alat bantu yang komprehensif untuk merefleksikan kompleksitas yang tidak terselesaikan dari perspektif hukum ataupun keimigrasian.

2.2. Metode Pengumpulan Data

Dalam proses penelitian ini, penulis menghimpun data empiris melalui studi literatur dengan mengandalkan sumber referensi berupa buku, peraturan perundang-undangan, jurnal penelitian, sumber internet berupa artikel, hingga laporan hasil penelitian suatu instansi yang relevan dengan isu. Penulis dapat mengetahui demarkasi atas pertanyaan yang diajukan melalui telaah kepustakaan ini serta menginterpretasikan hasil penelitian dalam ranah pembaharuan yang tentunya dapat menangkal replikasi kajian yang minim nilai gunanya.

2.3. Teknik Analisis Data

Output penelitian berfokus pada kajian yang dihasilkan melalui teknik deskriptif analitis dalam mengemas perspektif alternatif berupa analisis data yang disajikan untuk memperoleh konklusi atas problematika fundamental yang sedang dihadapi. Penggunaan Teknik Analisa kualitatif menjadi sarana yang memadai terhadap isu yang diangkat karena memanfaatkan aspek normatif yuridis secara deskriptif analitis, yakni memberikan paparan dari data konkret untuk dikaji relevansinya dengan sumber data lain. Dalam penulisan ini, terdapat tujuan untuk menggalikebenaran empiris agar memantik adanya temuan ilmiah yang mengandung unsur novelty berupa kajian strategis, dan menjadi sarana penguat atau bahkan mendekonstruksi output ilmiah sebelumnya.

3. PEMBAHASAN

Pemilu dan Keimigrasian

Keimigrasian merupakan pilar utama dalam menghadapi ancaman yang dapat mengganggu kedaulatan negara yang berasal dari faktor luar. Dari segi yuridis, undang-undang nomor 6 tahun 2011 tentang keimigrasian, pada pasal 1 angka (1), menjelaskan bahwa: "*keimigrasian adalah hal ihwal lalu lintas orang yang masuk atau keluar Wilayah Indonesia serta pengawasannya dalam rangka menjaga tegaknya kedaulatan negara*". Selain itu, pasal 1 angka (3) menetapkan fungsi imigrasi, mencakup pelayanan masyarakat, penegakan hukum, keamanan negara, dan pembangunan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, peran imigrasi sangat penting dalam menjaga kedaulatan negara dengan

melibatkan fungsi-fungsi tersebut.³

Dalam hubungannya dengan pemilu, keimigrasian berperan penting dalam urusan yang melibatkan kehadiran orang asing. Kehadiran orang asing dalam suatu negara dapat membawa dampak signifikan pada opini publik yang berpengaruh pada integritas dan keamanan pemilu. Seperti dalam acara kampanye yang diadakan oleh salah satu calon presiden, Anies Baswedan di Mataram yang memberi kesempatan kepada orang asing untuk memberikan pendapatnya mengenai pariwisata di Indonesia.⁴ Keterlibatan orang asing dapat membawa kontribusi positif, yakni dapat memberikan keberagaman perspektif dan sudut pandang berbeda terkait isu-isu nasional yang dapat memperkaya diskusi politik dan memberikan wawasan baru terhadap tantangan yang dihadapi oleh suatu negara.

Di sisi lain, kehadiran orang asing juga membawa potensi dampak negatif pada pemilu. Salah satu risiko utama adalah terkait dengan potensi campur tangan eksternal yang dapat memanipulasi opini publik, menyebarkan disinformasi, atau bahkan mencoba mempengaruhi hasil pemilu sesuai dengan kepentingan mereka. Pihak asing juga dapat mencoba memanfaatkan celah dalam sistem keimigrasian untuk melakukan intervensi yang merugikan integritas pemilu.

Dari sinilah pengawasan dan pengamanan pemilu menjadi semakin penting. Sistem keimigrasian harus dikelola secara ketat untuk mencegah potensi penyalahgunaan dan intervensi dari pihak asing. Operasi pengawasan keimigrasian dapat menjadi instrumen kritis dalam mendeteksi dan mencegah potensi ancaman keamanan pemilu yang melibatkan orang asing. Kolaborasi antara lembaga pemilu, lembaga keamanan, dan otoritas keimigrasian menjadi esensial untuk menjamin pemilu yang bebas dari campur tangan yang merugikan.

Peran Imigrasi Dalam Mengentaskan Ancaman Pada Pemilihan Umum

Direktorat Jenderal Imigrasi mengeluarkan Surat Edaran Direktur Pengawasan dan Penindakan Keimigrasian, Direktorat Jenderal Imigrasi No. IMI.5-GR.03.06-538 tanggal 19 Desember 2023, tentang Pelaksanaan Operasi Jagratara Pengawasan Orang Asing. Melalui surat edaran ini, Kantor Imigrasi seluruh Indonesia diperintahkan untuk menggelar pengawasan orang asing “Jagratara” dalam rangka pengamanan Natal, Tahun Baru, Pemilihan Umum (Pemilu), dan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Tahun 2024.⁵

Operasi Pengawasan Jagratara merupakan kebijakan yang dilakukan dalam rangka mengantisipasi potensi pelanggaran, terutama di sektor keimigrasian dan bidang hukum lainnya. Tujuan dari operasi ini adalah untuk menjaga integritas dan keamanan negara dengan memastikan bahwa pergerakan orang asing dan aktivitas di wilayah Indonesia sesuai dengan

³ Dinda Mayang, Panca Wani, and Warisul Ambia, “NEGARA DI INDONESIA (ROLE OF IMMIGRATION AND LEGAL STRATEGY EFFORTS IMMIGRATION IN FACING THREATS OF THE STATE SOURCE IN INDONESIA)” 11, no. 6 (2021): 44–56.

⁴ Video Tribune News Lombok

⁵ Kanim Balikpapan, “Amankan Nataru Dan Pemilu, Imigrasi Se-Indonesia Gelar Operasi Pengawasan,” last modified 2024, accessed January 13, 2024, <https://kanimbalipapan.kemenkumham.go.id/amankan-nataru-dan-pemilu-imigrasi-se-indonesia-gelar-operasi-pengawasan/>.

ketentuan hukum yang berlaku.

Fokus utama dari operasi pengawasan Jagratara yakni memantau kondisi dan keadaan stabilitas keamanan serta ketertiban. Mencakup pemantauan terhadap pergerakan orang asing, identifikasi potensi ancaman terhadap keamanan nasional, dan pencegahan terjadinya pelanggaran hukum.⁶

Dalam melaksanakan operasi Jagratara, pengawasan keimigrasian meliputi:⁷

- a. Pemeriksaan orang asing berupa dokumen perjalanan atau izin tinggal;
- b. Pemeriksaan keberadaan orang asing; dan
- c. Pemeriksaan kesesuaian kegiatan orang dengan izin tinggalnya.

Temuan Pelanggaran dalam Operasi Pengawasan Jagratara

Dalam pelaksanaan Operasi Jagratara pada tanggal 27-28 Desember 2023, ditemukan dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh Warga Negara Asing (WNA) sebagai berikut:

1. Delapan orang WNA dari Australia dan Republik Rakyat Tiongkok diduga terlibat dalam ketidaksesuaian antara izin tinggal mereka dengan kegiatan yang mereka lakukan. Penemuan ini dilakukan oleh Petugas Divisi Keimigrasian Bali dan Kantor Imigrasi Kelas I TPI Jakarta Utara.
2. Warga negara Rusia, Pakistan, dan Nigeria ditemukan melanggar batas waktu izin tinggal (*overstay*), hasil pemantauan yang dilakukan oleh Petugas Divisi Keimigrasian Bali, Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Pematang, dan Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Bogor.

Direktorat Jenderal Imigrasi juga berhasil mengamankan 30 orang asing yang diduga melakukan pelanggaran keimigrasian. Orang asing yang diamankan terdiri dari 28 warga negara India dan dua warga negara Republik Rakyat Tiongkok. WNA India tersebut diduga terlibat dalam kegiatan yang tidak sesuai dengan izin tinggal yang mereka miliki, yaitu mengoperasikan mesin produksi manufaktur untuk membuat kerajinan perhiasan dari bahan baku perak. Jenis izin tinggal yang dimiliki termasuk izin tinggal terbatas (ITAS) penanam modal sebanyak 18 orang, ITAS bekerja sebanyak enam orang, dan izin tinggal kunjungan (ITK) sebanyak empat orang.

Sementara itu, dua warga negara Republik Rakyat Tiongkok berhasil diamankan sebagai tindak lanjut atas pengembangan perkara 13 Daftar Pencarian Orang (DPO) Kepolisian Republik Rakyat Tiongkok yang telah dideportasi pada tanggal 20 dan 21 Desember 2023. Saat pemeriksaan petugas, kedua warga negara RRT tersebut tidak dapat memperlihatkan dokumen paspor atau izin tinggal yang sah. Oleh karena itu, petugas memutuskan untuk

⁶ Okebaik News, "Astaga!!! Seorang WNA Asal Rumania Masuk DPT Pemilu 2024 Di Kelurahan Salahuddin," last modified 2024, accessed January 16, 2023, <https://www.okebaik.id/2023/12/29/astaga-seorang-wna-asal-rumania-masuk-dpt-pemilu-2024-di-kelurahan-salahuddin/>.

⁷ Midran Dylan and Ohan Suryana, *Pengawasan Keimigrasian: Teknik Substantif Laboratorium Forensik Keimigrasian*, 1st ed. (Depok: BPSDM KUMHAM Press, 2020).

mengawal kedua Orang Asing ini ke Direktorat Jenderal Imigrasi guna proses pemeriksaan lebih lanjut.⁸

Temuan WNA Terdaftar sebagai Daftar Pemilu Tetap (DPT) 2024 pada Operasi Jagratara

Dalam pelaksanaan operasi pengawasan Jagratara di Kantor Imigrasi Kelas 1 TPI Ternate, petugas menemukan adanya satu Warga Negara Asing (WNA) asal Rumania yang terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilu 2024. Penemuan ini terjadi saat petugas melakukan koordinasi dan pengecekan data DPT di Kelurahan Salahuddin.

Setelah dilakukan pengecekan lebih lanjut, ternyata identitas salah satu pemilih dalam DPT tersebut adalah seorang WNA berkewarganegaraan Rumania yang tercatat sebagai pemilik Izin Tinggal Tetap (ITAP) dan memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP) Warga Negara Asing.

Kepala Seksi Intelijen dan Penindakan Keimigrasian Kantor Imigrasi Kelas I TPI Ternate, Risal Madjojo, menjelaskan bahwa setelah menemukan temuan tersebut, petugas imigrasi segera berkoordinasi dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Ternate.

Keberadaan WNA tersebut dalam DPT Pemilu merupakan kesalahan petugas KPU. Saat dilakukan pencocokan dan penelitian di lapangan, ternyata orang asing tersebut tidak terdaftar dalam Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilu (PD4). Kesalahan ini terjadi saat pemindahan data ke Pemilih Baru, di mana status kewarganegaraan pada e-KTP Asing yang bersangkutan tidak diperhatikan.

Selanjutnya, KPU Kota Ternate mengeluarkan Surat No. 183/PL.01.2-SD/8271/2023 untuk menindaklanjuti temuan dari pihak imigrasi. Sesuai dengan prosedur yang berlaku, KPU menyatakan komitmen untuk berupaya agar WNA tersebut tidak ikut serta pada saat pelaksanaan Pemungutan Suara Pemilu 2024.

Kritisasi Peran Imigrasi Terhadap Pengamanan Pemilu

Kerjasama antara Imigrasi dan lembaga pelaksana pemilihan umum merupakan hal yang sangat penting dalam memastikan integritas dan keamanan selama pemilihan umum. Masih Kurangnya integrasi dapat menciptakan celah yang memungkinkan terjadinya pelanggaran. Perlu adanya protokol kerjasama yang jelas dan komprehensif yang mencakup langkah-langkah konkret, batasan tugas, dan mekanisme komunikasi yang efektif.

Terkait dengan ditemukannya WNA yang masuk dalam Daftar Pemilu Tetap, perlu dibentuk Sistem pelaporan terpadu terhadap pelanggaran daftar pemilih tetap (DPT). Keberhasilan pemilihan umum tidak hanya tergantung pada pematkhiran data pemilih yang akurat tetapi juga pada kemampuan untuk mendeteksi dan menanggulangi pelanggaran yang mungkin terjadi terhadap DPT. Dengan adanya sistem pelaporan terpadu, masyarakat dan lembaga terkait dapat secara efisien berkolaborasi dalam mendeteksi dan mengatasi potensi pelanggaran yang dapat mengancam keadilan pemilu.

⁸ Kanim Balikpapan, "Amankan Nataru Dan Pemilu, Imigrasi Se-Indonesia Gelar Operasi Pengawasan," last modified 2024, accessed January 16, 2024, <https://kanimbalipapan.kemerkumham.go.id/amankan-nataru-dan-pemilu-imigrasi-se-indonesia-gelar-operasi-pengawasan/>.

Sistem ini mampu memberikan deteksi dini terhadap pelanggaran DPT, memungkinkan pihak berwenang untuk merespon dengan cepat dan mencegah kerusakan lebih lanjut. Melalui sistem pelaporan yang terintegrasi, informasi mengenai pelanggaran DPT dapat diakses secara terbuka, meningkatkan transparansi proses pemilu dan menjaga akuntabilitas para pemangku kepentingan, seperti Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan lembaga pengawas pemilu.

Koordinasi yang lebih efektif antara berbagai instansi terkait, seperti aparat keamanan, KPU, dan lembaga pengawas, juga dapat ditingkatkan melalui sistem pelaporan terpadu. Informasi yang terintegrasi memungkinkan kolaborasi yang sinergis, memperkuat langkah-langkah pencegahan, dan mengoptimalkan respon terhadap pelanggaran DPT. Selain itu, adopsi sistem ini dapat membantu mencegah manipulasi dan penyalahgunaan data pemilih, sehingga menjaga integritas dan keabsahan hasil pemilu.

Dengan adanya sistem pelaporan terpadu, juga memiliki dampak positif pada kepercayaan masyarakat terhadap proses pemilu. Masyarakat merasa lebih didengar dan terlibat secara aktif dalam menjaga integritas pemilu melalui saluran pelaporan yang mudah diakses. Terlebih lagi, sistem ini mampu menanggapi perubahan dinamika pemilu dengan cepat, memastikan bahwa setiap potensi pelanggaran DPT dapat ditangani secara efisien, sehingga proses pemilihan umum tetap berlangsung dengan adil dan transparan.

4. PENUTUP

4.2. Kesimpulan

Dalam menjaga integritas pemilu, kehadiran orang asing dapat membawa dampak positif dalam memberikan sudut pandang berbeda, namun juga membawa potensi campur tangan yang merugikan. Oleh karena itu, operasi pengawasan keimigrasian seperti "Jagrata" menjadi penting untuk mencegah potensi ancaman terhadap keamanan pemilu.

Dalam melaksanakan operasi "Jagrata", Direktorat Jenderal Imigrasi mengeluarkan Surat Edaran untuk pengawasan orang asing, dengan fokus utama pada pemantauan pergerakan orang asing, identifikasi potensi ancaman, dan pencegahan pelanggaran keimigrasian. Dalam pelaksanaannya, ditemukan beberapa pelanggaran terkait dengan izin tinggal dan keberadaan orang asing, termasuk WNA yang terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilu 2024. Temuan ini menyoroti pentingnya kerjasama antara lembaga imigrasi dan lembaga pemilihan umum dalam memastikan integritas pemilu.

Kritisasi terhadap peran imigrasi juga mencakup kebutuhan akan sistem pelaporan terpadu terkait dengan pelanggaran DPT. Sistem ini diharapkan dapat memberikan deteksi dini terhadap pelanggaran, meningkatkan transparansi proses pemilu, memperkuat kolaborasi antar-lembaga terkait, serta meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap integritas pemilu.

Dengan demikian, penting untuk memperkuat kerjasama antara lembaga imigrasi dan lembaga pemilihan umum, serta mengadopsi sistem pelaporan

terpadu untuk meningkatkan pengawasan dan pengamanan pemilu dari potensi ancaman yang melibatkan orang asing. Selain itu, perlu dikembangkan protokol kerjasama yang jelas dan komprehensif untuk memastikan integritas dan keamanan pemilu.

4.3. Saran

Saran yang dapat diberikan terkait teks tersebut adalah pentingnya meningkatkan koordinasi dan kolaborasi antara lembaga imigrasi dan lembaga pemilihan umum. Sistem pelaporan terpadu yang mencakup pelanggaran DPT dapat menjadi alat efektif dalam mendeteksi dini dan menanggulangi potensi ancaman terhadap integritas pemilu. Diperlukan langkah-langkah konkrit untuk memperkuat kerjasama ini, seperti penyelenggaraan pertemuan rutin, pelatihan bersama, dan pengembangan protokol kerjasama yang lebih terinci. Selain itu, peningkatan transparansi melalui sistem pelaporan dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap integritas pemilu. Adopsi teknologi informasi yang canggih dan sistem analisis data dapat mendukung efisiensi dalam pelaporan dan penanganan pelanggaran. Dengan mengambil langkah-langkah ini, diharapkan lembaga imigrasi dan pemilihan umum dapat bersinergi lebih baik dalam menjaga keamanan dan integritas pemilu, sehingga proses demokratisasi dapat berlangsung dengan lebih lancar dan adil.

DAFTAR PUSTAKA

Dylan, Midran, and Ohan Suryana. *Pengawasan Keimigrasian: Teknik Substantif Laboratorium Forensik Keimigrasian*. 1st ed. Depok: BPSDM KUMHAM Press, 2020.

Kanim Balikpapan. "Amankan Nataru Dan Pemilu, Imigrasi Se-Indonesia Gelar Operasi Pengawasan." Last modified 2024. Accessed January 13, 2024. <https://kanibalikpapan.kemenkumham.go.id/amankan-nataru-dan-pemilu-imigrasi-se-indonesia-gelar-operasi-pengawasan/>.

———. "Amankan Nataru Dan Pemilu, Imigrasi Se-Indonesia Gelar Operasi Pengawasan." Last modified 2024. Accessed January 16, 2024. <https://kanibalikpapan.kemenkumham.go.id/amankan-nataru-dan-pemilu-imigrasi-se-indonesia-gelar-operasi-pengawasan/>.

Kholda, Daniah, and Putu Jodhita Putri. "DEMOKRASI DAN PERKEMBANGANNYA DENGAN TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI (TIK): WACANA DIGITALISASI DALAM PEMILIHAN UMUM DI INDONESIA TAHUN 2024 Daniah Kholda , Putu Jodhita Putri Jurnal Ilmu Hukum , Sosial , Dan Humaniora Pendahuluan Topik Pembahasan Da" 1, no. 2023 (2024): 37–45.

Mayang, Dinda, Panca Wani, and Warisul Ambia. "NEGARA DI INDONESIA (ROLE OF IMMIGRATION AND LEGAL STRATEGY EFFORTS IMMIGRATION IN FACING THREATS OF THE STATE SOURCE IN INDONESIA)" 11, no. 6 (2021): 44–56.

Okebaik News. "Astaga!!! Seorang WNA Asal Rumania Masuk DPT Pemilu 2024 Di Kelurahan Salahuddin." Last modified 2024. Accessed January 16,

2023. <https://www.okebaik.id/2023/12/29/astaga-seorang-wna-asal-rumania-masuk-dpt-pemilu-2024-di-kelurahan-salahuddin/>.